



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1993
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CUBA
MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN PERDAGANGAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 1992 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Cuba mengenai Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Cuba;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CUBA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN PERDAGANGAN.**

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Cuba mengenai Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 1992 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Cuba yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Spanyol, dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 1993
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1993 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

ttd.

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK CUBA
MENGENAI
KERJASAMA EKONOMI DAN PERDAGANGAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Cuba, selanjutnya disebut sebagai Para Pihak.

Berhasrat untuk mempererat persahabatan dan kerjasama antara kedua negara;

Bermaksud untuk mengembangkan kerjasama yang menguntungkan di bidang ekonomi dan perdagangan;

Berdasar atas prinsip persamaan dan saling menguntungkan;

Telah sepakat sebagai berikut :

PASAL I

Para Pihak akan meningkatkan pengembangan hubungan ekonomi dan perdagangan antara kedua negara dalam kerangka Persetujuan ini dan sesuai dengan undang-undang dan peraturan di masing-masing negara.

Dorongan akan diberikan bagi kerjasama antara badan-badan pemerintah dan swasta di kedua negara.

PASAL II

- (a) Para Pihak, akan berusaha untuk mengambil segala langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong dan mengembangkan kerjasama ekonomi dan perdagangan kedua negara.
- (b) Kerjasama ekonomi menurut Persetujuan ini dapat dikembangkan dalam bidang-bidang yang akan dirinci atas kesepakatan bersama.
- (c) Para Pihak akan meningkatkan kegiatan dari perusahaan-perusahaan pelayaran kedua negara dalam pengangkutan barang-barang yang diperdagangkan antar mereka, atas dasar syarat-syarat yang sama dan prinsip pembagian yang berimbang.

(d) Kapal-...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (d) Kapal-kapal yang dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan perkapalan dari salah satu Pihak di pelabuhan-pelabuhan di Pihak lain akan menikmati perlakuan negara yang paling menguntungkan sesuai undang-undang dan peraturan-peraturannya.

Masing-masing Pihak akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memudahkan pengoperasian kapal-kapal yang dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan pelayaran dari Pihak lain.

PASAL III

Pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan yang telah disetujui dalam Persetujuan ini akan dilaksanakan melalui pengaturan-pengaturan atau kontrak-kontrak antara perusahaan-perusahaan dan organisasi-organisasi atau badan-badan baik swasta atau Pemerintah dari kedua negara.

PASAL IV

Para Pihak akan saling memberikan perlakuan negara yang paling menguntungkan mengenai bea dan cukai dan pajak-pajak lainnya dari bea-bea yang dikenakan dalam perdagangan kedua negara, yang telah disetujui oleh mereka dalam Persetujuan Umum mengenai Perdagangan dan Tarif (GATT).

Dalam hal timbulnya masalah-masalah dalam penerobosan (akses) pasar, kedua Pihak atas permintaan salah satu Pihak, dengan semangat kerjasama dan saling pengertian mencari jalan keluar yang layak.

PASAL V

Perlakuan yang disebut dalam Pasal sebelumnya tidak berlaku terhadap keuntungan yang telah diberikan atau yang akan diberikan kepada negara ketiga oleh Para Pihak dalam kerangka persetujuan-persetujuan perdagangan bebas atau kesatuan bea pada lalu-lintas perbatasan dan dalam hal gabungan asosiasi-asosiasi khusus.

PASAL VI

Para Pihak, sesuai sistim hukumnya akan memberikan segala bantuan yang diperlukan kepada perorangan yang melakukan perjalanan dari satu negara ke negara lainnya sebagai akibat pelaksanaan dari Persetujuan ini.

PASAL VII

Semua pembayaran-pembayaran antara kedua negara akan dilakukan dalam mata uang - mata uang yang bebas dipertukarkan (convertible), sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan devisa yang berlaku di masing-masing negara.

PASAL VIII...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

PASAL VIII

Masing-masing Pihak akan memberikan kemudahan keikutsertaan Pihak lain atau perusahaan-perusahaannya dalam pameran dagang atau pameran seni yang akan diselenggarakan dalam wilayahnya, sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang mungkin dikenakan oleh pihak-pihak yang berwenang dari negara dimana pameran dagang dan pameran seni diselenggarakan.

PASAL IX

Kedua belah Pihak setuju membentuk Komisi Bersama untuk menilai pelaksanaan Persetujuan ini, membahas masalah-masalah yang mungkin timbul dari pelaksanaan suatu persetujuan dan membuat segala sarana-saran yang perlu untuk mencapai sasarnya.

Komisi Bersama ini, akan bertemu satu kali dalam satu tahun secara bergantian di Indonesia dan Cuba sesuai dengan kesepakatan kedua belah Pihak.

Komisi Bersama ini akan membentuk kelompok kerja dan menunjuk ahli-ahli dan penasihat-penasihat untuk menghadiri pertemuan-pertemuan, apabila diperlukan.

PASAL X

Bila terjadi perselisihan antara Para Pihak mengenai pelaksanaan Persetujuan ini akan diselesaikan melalui konsultasi dan perundingan.

PASAL XI

Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal pertukaran piagam pengesahan.

Persetujuan akan tetap berlaku untuk 5 (lima) tahun dan akan secara otomatis diperpanjang untuk setiap tahun berikutnya kecuali salah satu Pihak memberitahukan kepada Pihak yang lain secara tertulis keputusan untuk mengakhiri Persetujuan yang diajukan 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhirnya Persetujuan.

Dalam hal telah berakhirnya Persetujuan ini terhadap setiap kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi yang mungkin timbul dari kontrak-kontrak dagang dan persetujuan-persetujuan dagang yang dihasilkan selama jangka waktu berlakunya Persetujuan ini, ketentuan-ketentuannya masih tetap berlaku.

Atas permintaan salah satu Pihak, Persetujuan ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan bersama.

SEBAGAI...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

SEBAGAI BUKTI yang bertandatangan di bawah ini, yang dikuasakan oleh Pemerintah mereka masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 1992 dalam rangkap 3 (tiga) asli masing-masing dalam Bahasa Indonesia,

Bahasa Spanyol dan Bahasa Inggris, ketiga Naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan dalam penafsiran, Naskah Bahasa Inggris yang akan digunakan.

ATAS NAMA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

ATAS NAMA PEMERINTAH
PEMERINTAH CUBA

ALI ALATAS
Menteri Luar Negeri

RICARDO ALARCON DE QUESADA
Menteri Luar Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

ACUERDO

entre el Gobierno de la República de Cuba
y el Gobierno de la República de Indonesia
sobce Cooperación Económica y Comercial

El Gobierno de la Republica de Cuba y el Gobierno de la República de Indonesia, referido en lo adelante como las Partes.

Deseosos de fortalecer la amistad y cooperación entre ambos paises;

Teniendo la intención de promover la cooperación mutuamente ventajosa en las esferas economica y comercial;

Basado en los principios de igualdad y beneficio mutuos;

Han acordado lo siguiente;

ARTICULO I

Ambas Partes estimularan el desarrollo de las relaciones economicas y comerciales entre los dos paises, en el marco del presente acuerdo, conforme a sus respectivas regulaciones y leyes.

Estimularan la cooperacion entre las instituciones estatales y privadas de ambos paises.

ARTICULO II

- (a). Ambas Partes se esforzaran en tomar las medidas necesarias para estimular y desarrollar la cooperacion economica y comercial entre ambos paises.
- (b). La cooperacion economica a que se refiere el presente Acuerdo puede ser desarrollada en las esferas que seran especificadas bajo el mutuo consentimiento.
- (c). Ambas Partes estimularan a que las mercancías objeto de intercambio sean transportadas por las compañías navieras de ambos paises, sobre bases de justa reciprocidad.
- (d). Los buques operados por la compañía naviera de una de las partes, disfrutaran, en los puertos de la otra parte, de tratamiento favorecido, bajo las leyes y regulaciones vigentes de este ultimo.

Cada Parte debera adoptar las medidas necesarias de formatal que ello facilite las operaciones de los buques de la otra parte.

ARTICULO III...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

ARTICULO III

La ejecución de las actividades acordadas mediante el presente acuerdo, se llevarán a vías de hecho a través de arreglos o contratos entre las empresas, organizaciones e instituciones, ya sean estatales o privadas de ambos países.

ARTICULO IV

Las Partes deberán otorgarse mutuamente un trato de nación más favorecida, respecto a los derechos arancelarios y otros impuestos aplicables al intercambio comercial entre ambos países, tal y como está acordado en el Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio (GATT).

En el caso que surjan dificultades respecto al acceso de mercado en sus relaciones comerciales, las Partes, sobre la base de solicitud de una de ellas, buscarán una solución adecuada en el marco de la cooperación y mutuo entendimiento.

ARTICULO V

El tratamiento a que se refiere el artículo precedente, no será aplicable a los beneficios concedidos o por conceder a terceros países por las Partes, dentro del marco de libre comercio o acuerdos de unión aduanera sobre tráfico fronterizo y en el caso de asociaciones mixtas especiales.

ARTICULO VI

Las Partes deberán, de acuerdo con sus sistemas legales, conceder a los individuos que viajen de un país al otro, como resultado del presente acuerdo, las facilidades necesarias para el cumplimiento de sus tareas.

ARTICULO VII

Todos los pagos entre los dos países deberán realizarse en moneda libremente convertible, sujeto a las leyes y regulaciones sobre divisas, existentes en sus respectivos países.

ARTICULO VIII

Cada una de las Partes deberán facilitar la participación de la otra Parte o de sus empresas, en exposiciones y ferias comerciales que se celebren en sus países, sujeto a los términos y condiciones establecidos por las autoridades competentes del país donde se celebren estos eventos.

ARTICULO IX...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

ARTICULO IX

Ambas Partes acuerdan establecer una Comision mixta para examinar la implementacion del presente Acuerdo, asi como para analizar los problemas que puedan surgir como resultado de la aplicacion de este Acuerdo, y formular las sugerencias pertinentes para alcanzar los objetivos plasmados en el documento.

La Comision Mixta debera reunirse cuando se considere necesario y de mutuo acuerdo, alternando su sede en Cuba e Indonesia.

La Comision Mixta debera, cuando sea necesario, crear grupos de trabajo, asi como designar los expertos y consejeros que asistiran a las reuniones.

ARTICULO X

Cualquier polemica que surja entre las Partes como resultado de la aplicacion del presente Acuerdo, sera solucionada a traves de consultas o negociaciones.

ARTICULO XI

Este Acuerdo entrara en vigencia en la fecha en que se intercambien los instrumentos de ratificacion.

Estará vigente durante un periodo de cinco (5) años y será renovado automáticamente por periodos sucesivos de un año, salvo que alguna de las Partes notificara a la otra por escrito su decision de terminarlo seis (6) meses antes de la fecha de vencimiento.

En caso de vencimiento del Acuerdo, se mantendrá vigente cualquier obligacion que se derive de algun contrato comercial o acuerdos de negocios que hayan sido firmados durante su validez.

Al ser solicitado por algunas de las Partes, el presente Acuerdo podrá ser enmendado, siempre y cuando sea por mutuo acuerdo.

Los abajo firmantes han sido debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, y han firmado el presente Acuerdo.

Dado en la ciudad de Jakarta, a los 31 dias del mes de Agosto de 1992, en tres originales, en español, bahasa e inglés, siendo cada uno de ellos autentico.

En caso...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

En caso de alguna divergencia de su interpretación, el texto en inglés deberá ser el prevaleciente.

POR EL GOBIERNO DE
LA REPUBLICA DE CUBA

RICARDO ALARCON DE QUESADA
MINISTRO DE RELACIONES
EXTERIORES

POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE INDONESIA

ALI ALATAS
MINISTRO PARA LAS RELACIONES
EXTERIORES



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CUBA
ON ECONOMIC AND TRADE COOPERATION

=====

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Cuba, hereinafter referred to as the Parties.

Desiring to strengthen friendship and cooperation between the two countries;

Intending to promote an advantageous cooperation in the economic and trade fields;

Based on the principles of equality and mutual benefit;

Have agreed as follows :

ARTICLE I

The Parties shall promote the expansion of economic and trade relations between the two countries within the framework of this Agreement and in accordance with their respective laws and regulations.

Encouragement shall be given to the cooperation between public and private institutions of both countries.

ARTICLE II

- (a). The Parties shall endeavor to take all the necessary measures to encourage and to develop the economic and trade cooperation between the two countries.
- (b). The economic cooperation referred to in the Agreement may be develop in the areas which will be specified by mutual consent.
- (c). The Parties shall promote the operation of shipping lines of both countries in the cargo transportation of goods traded between them, under the same conditions in a fair share principle.
- (d). The ships operated by shipping lines of one Party shall, in the ports of the other Party, enjoy the most favoured treatment under the laws and regulations of the latter.

Each Party shall adopt all the necessary measures to facilitate the operations of ships operated by shipping lines of the other Party.

ARTICLE III...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

ARTICLE III

The execution of the activities agreed upon in this Agreement shall be carried out through arrangements or contracts between firms, and organizations or institutions whether private or public of both countries.

ARTICLE IV

The Parties shall grant each other most-favoured-nation treatment with respect to customs duties and other taxes and duties applicable to trade exchange between the two countries, as agreed upon by them in the General Agreement on Trade and Tariff (GATT).

In case problems of access to market in their trade relations emerge, the Parties upon request by one of them, shall in the spirit of cooperation and mutual understanding find an adequate solution.

ARTICLE V

The treatment referred to in preceding Article shall not apply to the benefits already granted or to be granted to third countries by the Parties, within the framework of free trade or cantum union agreements, on frontier traffic and in the case of special joint associations.

ARTICLE VI

The Parties shall, according to their own legal system, grant the individuals who travel from one country to the other as a result of this Agreement, all the necessary assistance in the fulfillment of their duties.

ARTICLE VII

All payments between the two countries shall be made in freely convertible currencies, subject to foreign exchange laws and regulations effective in their respective countries.

ARTICLE VIII

Each Party shall facilitate the participation by the other Party or its enterprises in trade fairs or exhibitions to be held in its territory, subject to such terms and conditions as may be established by the competent authorities of the country where the trade fairs or exhibitions are to be held.

ARTICLE IX

Both Parties agree to establish a Joint Commission to examine the implementation of this Agreement, to discuss the issues that might arise from the application of such an agreement and to make all the necessary suggestion for the achievement of its goals.

This...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

This Joint Commission shall meet, when considered appropriate by mutual agreement, alternately in Indonesia and Cuba.

This Joint Commission shall, whenever necessary, establish working groups and appoint experts and advisors to attend the meetings.

ARTICLE X

Any dispute between the Parties concerning the implementation of this Agreement should be settled through consultation or negotiation.

ARTICLE XI

This Agreement shall enter into force on the date of the exchange of the instruments of ratification.

It shall remain in force for five (5) years and shall be automatically renewed for successive periods of one year, unless any of the Parties shall notify the other in writing its decision to terminate it six (6) months prior to the nearer expiration date.

In case of the expiration of the Agreement its provisions shall still apply in respect to any unfulfilled obligation that may arise from commercial contracts and business agreements concluded during the period of its validity.

At the request of either Party, the present Agreement may be revised by mutual consent.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective governments, have signed the present Agreement.

DONE in Jakarta 31 st of August 1992, in three original copies, each in the Indonesian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the
Republic of Indonesia

ALI ALATAS
Minister for Foreign Affairs

For the Government of the
Republic of Cuba

RICARDO ALARCON DE QUESADA
Minister of Foreign Affairs